

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 4, May 2025, P. 361-369

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15526914>

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi Pengaruh Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat

Ilham Maulana¹, Muhammad Husain Haikel², Muhammad Nadirul Irfan³, Cep Abdul Hafid⁴,
Muhammad Hafiz Ahza Rafie⁵, Agim Ginanjar⁶, Farhan Musaffa⁷ Dian Herdiana⁸

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Email : ilhammln1103@gmail.com¹, mhusenhaikal5@gmail.com², nadirulirfan@gmail.com³,
hafidcepabdul@gmail.com⁴, hahza0205@gmail.com⁵, agimginanjar25@gmail.com⁶,
farhanmussafa@gmail.com⁷, dianherdiana@uinsgd.ac.id⁸..

Abstract

High inflation can significantly pressure people's purchasing power as rising prices of goods and services reduce consumers' ability to meet daily needs. This study aims to analyze the Indonesian government's policies in mitigating the impact of inflation on purchasing power. The method used is library research by analyzing various literature and journals related to inflation, purchasing power, and macroeconomic policy in Indonesia. The results show that the government, through monetary and fiscal policies such as interest rate control, subsidies, and regulation of staple goods prices, plays a key role in maintaining price stability and purchasing power. Controlled inflation allows for balanced economic growth and supports public welfare. However, challenges remain in implementing these policies to ensure that the impact of inflation does not overly burden low-income groups.

Keywords: *inflation, purchasing power, government.*

Abstrak

Inflasi yang tinggi dapat memberikan tekanan signifikan terhadap daya beli masyarakat karena kenaikan harga barang dan jasa mengurangi kemampuan konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan menganalisis berbagai literatur dan jurnal terkait inflasi, daya beli, dan kebijakan ekonomi makro di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah melalui kebijakan moneter dan fiskal, seperti pengendalian suku bunga, subsidi, dan pengaturan harga kebutuhan pokok, berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Inflasi yang terkendali memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan kebijakan agar dampak inflasi tidak memberatkan kelompok berpendapatan rendah.

Kata kunci: *inflasi, daya beli, kebijakan pemerintah*

Article Info

Received date: 15 May 2025

Revised date: 20 May 2025

Accepted date: 27 May 2025

PENDAHULUAN

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode waktu tertentu. Kondisi ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat karena nilai uang yang dimiliki menjadi lebih rendah sehingga masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memperoleh barang dan jasa yang sama. Di Indonesia, inflasi menjadi isu penting yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan tetap dan masyarakat miskin yang paling rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dampak inflasi yang tinggi tidak hanya menurunkan daya beli, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketika harga-harga naik secara cepat dan tidak terkendali, konsumen cenderung mengurangi pengeluaran, sementara produsen menghadapi kesulitan dalam perencanaan produksi dan investasi (Anas Wahid Maulana & Isnan Sayid Maulana, 2024). Selain itu, inflasi juga dapat memperburuk distribusi

pendapatan dan meningkatkan kesenjangan sosial karena kelompok berpendapatan rendah lebih merasakan dampaknya,

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan moneter dan fiskal berupaya mengendalikan inflasi agar tidak memberatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini meliputi pengaturan suku bunga oleh Bank Indonesia, subsidi bahan pokok, pengendalian harga, serta koordinasi lintas sektor dan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian inflasi yang efektif sangat penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kajian literatur atau studi literatur. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi inflasi. Tahapan pengumpulan data meliputi mengumpulkan hasil penelitian terdahulu, kemudian menyajikan data (display data), dan menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan. Metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat informasi penting, serta mengelola bahan-bahan yang dijadikan dasar penelitian. Kajian literatur tidak hanya digunakan sebagai langkah awal dalam menyusun desain penelitian, tetapi juga sebagai cara untuk memperoleh data yang bersumber dari pustaka. Kajian literatur merupakan langkah awal yang penting dalam menyusun suatu rencana penelitian. Kajian ini dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan terbitan lain yang relevan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan sebuah tulisan yang membahas isu atau topik tertentu/

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inflasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah penurunan nilai uang kertas akibat banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan kenaikan harga barang-barang. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan inflasi sebagai situasi ekonomi yang ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa dalam jangka waktu panjang akibat ketidakseimbangan antara arus uang dan barang atau jasa. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menjelaskan inflasi sebagai peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu.

Inflasi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Berdasarkan tingkatannya, inflasi ringan terjadi jika angkanya di bawah 10% per tahun, inflasi sedang antara 10-30%, inflasi berat antara 30-100%, dan hiperinflasi jika melebihi 100% per tahun. Dari segi asalnya, inflasi domestik terjadi karena defisit anggaran yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, sedangkan inflasi impor disebabkan oleh kenaikan harga barang impor atau tarif impor yang tinggi. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dapat terjadi karena permintaan yang tinggi (demand inflation) atau karena kenaikan biaya produksi (cost inflation)(Artati dkk., 2025)

Sukirno (2013) mendefinisikan inflasi sebagai proses terjadinya kenaikan harga-harga dalam suatu perekonomian. Menurut Putong (2002), inflasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Berdasarkan penyebabnya, inflasi terdiri dari inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) dan inflasi dorongan biaya (cost push inflation). Berdasarkan sumbernya, inflasi dapat berasal dari dalam negeri (inflasi domestik) maupun dari luar negeri (inflasi impor).(Anggita Mujayanah dkk., 2024) Inflasi dapat dipicu oleh beberapa factor, antara lain : Kenaikan permintaan (Demand-Pull Inflation): Inflasi terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa melampaui kapasitas produksi atau pasokan yang tersedia, sehingga harga-harga mengalami kenaikan. Peningkatan biaya produksi (Cost-Push Inflation): Jika biaya bahan baku, energi, atau upah tenaga kerja naik, produsen biasanya akan menaikkan harga jual produk untuk menjaga margin keuntungan mereka. Faktor eksternal: Peristiwa seperti kenaikan harga minyak dunia atau gangguan pada rantai pasokan global juga dapat menyebabkan kenaikan harga beberapa barang di dalam negeri. Walaupun inflasi pada tingkat yang moderat dapat menandakan pertumbuhan ekonomi yang sehat, inflasi yang

terlalu tinggi atau berlangsung terlalu cepat dapat menimbulkan ketidakstabilan dan berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia

1. Kebijakan Moneter

Bank Indonesia mengendalikan inflasi melalui instrumen moneter seperti penyesuaian suku bunga acuan (BI Rate) dan operasi pasar terbuka. Selama 2010-2020, BI secara aktif menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk menstabilkan harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah uang beredar (M2) berkorelasi positif dengan inflasi, sehingga pengaturan likuiditas menjadi kunci untuk menghindari tekanan harga berlebih.

2. Kebijakan Fiskal

Subsidi bahan bakar dan program bantuan sosial (seperti BLT) meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi dapat memicu inflasi jika permintaan melampaui pasokan. Pengeluaran konsumsi pemerintah untuk infrastruktur dan layanan publik terbukti signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak selalu berdampak langsung pada inflasi.

3. Faktor Eksternal

Fluktuasi harga komoditas global, seperti minyak dan pangan, memengaruhi biaya produksi dan harga domestik. Contohnya, kenaikan harga minyak dunia pada 2012-2014 meningkatkan inflasi Indonesia hingga 8,36%. Nilai tukar mata uang yang melemah terhadap dolar AS menyebabkan kenaikan harga barang impor, yang berdampak pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dinamika Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi (2010-2020). Inflasi rendah hingga moderat (rata-rata 4,3% per tahun) mendukung pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5%. Namun, inflasi di atas 5% (seperti pada 2013-2014) mengurangi pertumbuhan PDB riil akibat penurunan daya beli dan investasi. Inflasi tinggi (>7%) meningkatkan biaya produksi industri, terutama sektor manufaktur, sehingga menghambat ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

Implikasi Kebijakan

Koordinasi moneter-fiskal diperlukan untuk menyeimbangkan stabilitas harga dan stimulasi ekonomi. Contohnya, kombinasi suku bunga rendah dan belanja infrastruktur pada 2016-2019 berhasil mempertahankan pertumbuhan 5,1% dengan inflasi 3%. Manajemen risiko eksternal, seperti diversifikasi impor dan penguatan cadangan devisa, menjadi kunci untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan global.

Studi empiris menunjukkan bahwa inflasi optimal untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 3-4%, di mana stabilitas harga tidak mengorbankan daya saing sektor riil. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan yang responsif dan berbasis data untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Dampak Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat

Inflasi memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang dan jasa sesuai dengan jumlah uang yang dimilikinya. Ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok seperti makanan, bahan bakar, dan perumahan, mengalami kenaikan yang cukup tajam. Jika pendapatan masyarakat tidak sejalan dengan kenaikan inflasi tersebut, maka nilai riil uang yang mereka miliki akan menurun, yang berakibat pada kemampuan mereka untuk membeli lebih sedikit barang dan jasa dibandingkan sebelumnya.

Sebagai akibat dari kenaikan harga ini, masyarakat umumnya akan mengurangi pengeluaran mereka, terutama untuk barang-barang non-esensial atau barang mewah. Mereka cenderung beralih ke pilihan barang yang lebih terjangkau dan lebih memprioritaskan kebutuhan pokok, sehingga terjadi perubahan pola konsumsi yang signifikan.

Kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan mereka yang bergaji tetap merasakan dampak inflasi yang lebih berat. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam menyesuaikan pendapatan dengan kenaikan harga. Di sisi lain, kelompok dengan pendapatan tinggi atau pemilik aset lebih mampu menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh inflasi. Penurunan daya beli dalam jangka panjang dapat berdampak negatif bagi kinerja perusahaan, mengurangi investasi, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, dampak ini juga berpotensi memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi agar tidak menurunkan daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan

ekonomi yang bersifat terintegrasi. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral:

1. Kebijakan Moneter: Dilaksanakan oleh Bank Indonesia, bertujuan untuk mengontrol jumlah uang beredar melalui pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib minimum. Dengan menaikkan suku bunga, konsumsi dan kredit akan ditekan, sehingga laju inflasi dapat dikendalikan. Namun, kebijakan ini perlu dijalankan hati-hati agar tidak memperlambat ekonomi secara berlebihan.
2. Kebijakan Fiskal: Pemerintah dapat mengatur belanja dan penerimaan negara untuk menjaga stabilitas harga. Melalui subsidi dan bantuan sosial, seperti subsidi BBM, listrik, dan bantuan tunai langsung, pemerintah membantu menjaga daya beli masyarakat miskin saat harga naik. Selain itu, belanja negara juga diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
3. Kebijakan Sektoral dan Stabilisasi Harga: Fokus pada pengendalian harga kebutuhan pokok seperti pangan dan energi. Pemerintah dapat melakukan operasi pasar, mengatur distribusi, dan mendukung produksi dalam negeri agar pasokan tetap stabil dan harga terkendali. Hal ini sangat penting agar inflasi tidak menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Kombinasi dari kebijakan-kebijakan tersebut membantu mengelola inflasi secara efektif dan mencegah dampak negatif yang berlebihan terhadap daya beli masyarakat.

Solusi Inflasi di Indonesia

Inflasi merupakan suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga yang hanya terjadi pada satu atau dua jenis barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut berkelanjutan dan memengaruhi harga barang lainnya. Dampak utama dari inflasi adalah menurunnya nilai uang, yang menyebabkan daya beli masyarakat ikut melemah. Seperti yang dialami oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, inflasi masih menjadi salah satu masalah ekonomi makro yang mengkhawatirkan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Menjelang akhir masa pemerintahan Orde Baru, sebelum krisis moneter terjadi, laju inflasi tahunan sempat berhasil ditekan hingga satu digit. Namun demikian, kondisi ini tetap menyimpan potensi risiko, terutama bila dilihat dari besarnya proporsi masyarakat miskin yang terdampak oleh inflasi. Ketika krisis moneter melanda dan berkembang menjadi krisis ekonomi, yang turut menyebabkan runtuhnya rezim Orde Baru, tingkat inflasi melonjak tajam—mencapai lebih dari 75% pada tahun 1998. Kondisi ini diperburuk oleh meningkatnya jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, meskipun inflasi di Indonesia tergolong tinggi, jika ditinjau dari dampak yang dirasakan oleh kelompok masyarakat ekonomi lemah, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memasuki tahap awal dari kondisi *hyperinflation*. Solusi untuk menghadapi inflasi di Indonesia, yaitu:

1. Penguatan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI), BI perlu mempertahankan independensi dan kredibilitas dalam menjalankan kebijakan moneter. Instrumen utama seperti suku bunga acuan (BI-Rate atau BI 7-Day Reverse Repo Rate) harus responsif terhadap tekanan inflasi dan ekspektasi inflasi. Komunikasi kebijakan yang transparan dan efektif juga krusial untuk memengaruhi ekspektasi pasar.
2. Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Sinergis, Pemerintah dan BI perlu berkoordinasi secara erat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Disiplin fiskal, pengendalian defisit anggaran, dan kebijakan harga yang konsisten dengan target inflasi BI sangat penting untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter.
3. Peningkatan Produktivitas, Mengatasi inflasi dari sisi penawaran (inflasi sisi penawaran) memerlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor riil. Hal ini dapat dicapai melalui investasi infrastruktur, perbaikan regulasi bisnis, pengembangan sumber daya manusia, dan dukungan terhadap inovasi teknologi.
4. Kebijakan Struktural untuk Mengatasi Hambatan Pasokan dan Distribusi, Pemerintah perlu mengatasi hambatan struktural yang menyebabkan inefisiensi dalam rantai pasokan dan distribusi barang dan jasa, terutama komoditas pangan. Ini termasuk perbaikan infrastruktur transportasi, logistik, dan regulasi perdagangan, serta penindakan praktik ekonomi.
5. Pengelolaan Ekspektasi Inflasi yang Terukur, BI perlu secara aktif mengelola ekspektasi inflasi melalui komunikasi yang kredibel, target inflasi yang jelas, dan tindakan kebijakan yang

konsisten dengan target tersebut. Survei ekspektasi inflasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menentukan kebijakan.

Kebijakan Pemerintah mengenai menanggulangi Pengaruh Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat

Inflasi adalah salah satu tantangan utama ekonomi Indonesia, terutama karena memiliki dampak signifikan pada belanja orang. Ketika inflasi naik, harga barang dan jasa umumnya meningkat dan terus meningkat, dengan kemampuan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah menengah, memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa kontrol inflasi tidak hanya mewakili masalah menjaga stabilitas ekonomi makro, tetapi juga terkait erat dengan perlindungan sosial, keadilan ekonomi dan upaya untuk mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah, bersama dengan Bank Indonesia, telah mengembangkan kebijakan peraturan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi dampak inflasi pada daya beli masyarakat.

Basis hukum untuk Petunjuk ini adalah Nomor Legal 23 dari tahun 1999 sehubungan dengan bank -bank Indonesia. Ini menegaskan operasi perbankan Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah barang dan stabilitas bank ketika berkaitan dengan stabilitas negara lain (inflasi) dan mata uang (Exchange Cools). Selain itu, dari perspektif mata uang, 2011 Number 7 juga mengatur kewajiban negara untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam nilai tukar rupiah. Dalam implementasinya, pemerintah bertujuan untuk inflasi $2,5\% \pm 1\%$ untuk periode 2025-2027. Sebagai bagian dari 31/202, kami menargetkan target inflasi nasional setiap tahun. Tujuan ini merupakan referensi untuk semua orang yang terlibat dalam penciptaan dan implementasi pedoman kontrol inflasi di tingkat pusat dan regional.

Salah satu langkah strategis pemerintah adalah untuk memperkuat sinergi antara pusat dan wilayah melalui pembentukan tim kontrol inflasi pusat (TPIP) dan tim kontrol inflasi regional (TPID). Kedua tim akan memainkan peran aktif dalam desain, implementasi dan evaluasi berbagai program kontrol inflasi yang disesuaikan dengan karakteristik masing -masing wilayah. Salah satu implementasi sebenarnya dari sinergi ini adalah persiapan peta jalan 2025-2027. Ini berfokus pada empat pilar utama: harga terjangkau, ketersediaan pengiriman, peningkatan distribusi yang lancar dan peningkatan komunikasi publik. Dengan Program BSPIP (Gerakan Kontrol Inflasi Makanan Nasional), pemerintah secara aktif menerapkan bisnis pasar yang murah dan memperkuat kerja sama antara daerah (KAD) untuk distribusi makanan dan inspeksi mendadak di pasar tradisional untuk memastikan bahwa harga kebutuhan dasar tetap stabil dan terjangkau.

Secara finansial, pemerintah mengoptimalkan biaya sosial untuk melindungi belanja bagi orang yang rentan terhadap turbulensi. Berkenaan dengan nomor hukum 17 pada tahun 2003, sehubungan dengan nomor keuangan dan hukum negara bagian 13 pada tahun 2011, pemerintah mendistribusikan bantuan langsung (BLT), subsidi energi seperti listrik dan bahan bakar minyak, dan bantuan pangan untuk bantuan langsung (BLT). Program -program ini dirancang untuk berada di garis finish, memungkinkan orang miskin dan mereka yang membutuhkan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka meskipun harga naik. Selain itu, pemerintah juga menawarkan insentif seperti diskon pada tarif listrik dan subsidi transportasi, terutama selama inflasi musiman, seperti selama masa krisis dan hari libur keagamaan nasional. Dari sisi uang, Bank Indonesia dengan hati -hati mengimplementasikan kebijakan suku bunga benchmark (Tingkat BI) untuk mengelola jumlah kota. Dengan meningkatnya inflasi, BI dapat meningkatkan suku bunga untuk mengekang konsumsi dan investasi yang berlebihan, dan tekanan inflasi uap. Selain itu, BI juga melakukan intervensi di pasar forex untuk menjaga stabilitas dalam kursus perubahan rupiah. Ini sangat penting mengingat banyak kebutuhan dasar Indonesia masih bergantung pada impor. Kebijakan moneter ini diterapkan dalam kebijakan moneter sehingga efeknya akan lebih efektif mempertahankan stabilitas harga dan daya beli orang.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan produksi dan distribusi barang -barang dasar dengan berinvestasi di sektor pertanian, mengembangkan infrastruktur logistik, dan meningkatkan informasi data dan makanan. Diversifikasi sumber makanan, pengembangan teknologi pertanian, dan penguatan petani akan menjadi fokus utama mempertahankan pasokan makanan nasional, dan harga tidak mudah karena gangguan cuaca dan faktor eksternal lainnya. Selain itu, praktik spekulasi dan pemantauan akumulasi produk telah diperburuk untuk mencegah kemacetan harga yang tidak wajar. Pemerintah juga mendorong pendidikan keuangan dan literasi bagi publik untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik di tengah situasi inflasi.

Dengan kombinasi kebijakan keuangan, keuangan dan struktural yang diintegrasikan dan didukung oleh kerangka hukum yang kuat, pemerintah Indonesia berkewajiban mempertahankan inflasi dan melindungi rakyatnya. Pedoman ini tidak hanya disesuaikan dalam waktu singkat untuk mengurangi turbulensi harga, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan secara sistematis, memastikan bahwa ekonomi lebih tahan terhadap dinamika global. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi dampak inflasi pada belanja orang adalah bagian dari strategi yang bagus untuk menerapkan pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi, adil dan berkelanjutan.

Hubungan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi merupakan kondisi ekonomi yang berdampak langsung pada kestabilan dan perkembangan perekonomian suatu negara. Di Indonesia, inflasi kerap menjadi salah satu persoalan utama dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan tingkat inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, menurunkan minat investasi, serta meningkatkan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis dan ekonomi. Lebih jauh lagi, inflasi yang tidak terkendali bisa menyebabkan distorsi dalam distribusi sumber daya serta memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan, yang berdampak pada meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi mencerminkan indikator kunci dalam menilai kemajuan suatu negara dan sangat dipengaruhi oleh beragam faktor, salah satunya adalah. Jika inflasi dapat dijaga pada tingkat yang stabil, hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan produksinya. Namun, inflasi yang tidak tertangani dengan baik justru akan mengganggu kestabilan harga dan menekan konsumsi rumah tangga, yang berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penanganan inflasi memerlukan sinergi kebijakan yang komprehensif dari sisi moneter maupun fiskal.

Bank Indonesia, selaku otoritas moneter, menerapkan pendekatan kerangka kerja pengendalian inflasi (*inflation targeting framework*), dengan memanfaatkan sejumlah instrumen seperti pengaturan suku bunga dan operasi pasar terbuka. Di sisi lain, pemerintah menjalankan peran fiskal melalui pengaturan subsidi, perpajakan, serta kebijakan perdagangan guna menjaga stabilitas harga kebutuhan dasar masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi menjadi sasaran utama pembangunan di berbagai negara, baik yang telah maju maupun yang sedang berkembang. Keberhasilan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kemampuan produksi nasional sekaligus mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini biasanya diukur melalui indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan berkelanjutan dalam jumlah produksi barang dan jasa. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tercermin melalui peningkatan pendapatan per kapita, yang berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, perumusan kebijakan ekonomi yang efektif harus mempertimbangkan pengelolaan inflasi secara optimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Berbagai studi menunjukkan bahwa inflasi dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui jalur konsumsi, investasi, dan pengaruh kebijakan moneter. Penelitian Purnomo (2020) menemukan bahwa keterbukaan ekonomi dan inflasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia. Selain itu, pentingnya strategi pengendalian inflasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas makroekonomi. Ini menegaskan bahwa pengelolaan inflasi yang tepat dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Hubungan diantaranya sebagai berikut:

A. Dampak Inflasi Tinggi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi yang berada pada level tinggi dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. setiap kenaikan inflasi sebesar 1% berpotensi menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi hingga 0,18%. Dalam publikasi di *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, dijelaskan bahwa lonjakan inflasi menggerus daya beli masyarakat karena kenaikan harga barang dan jasa sering kali melampaui pertumbuhan pendapatan. Akibatnya, konsumsi dan investasi ikut menurun. Daya beli yang melemah ini turut menghambat investasi produktif, yang akhirnya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. inflasi yang sangat rendah atau mendekati nol dapat menyebabkan stagnasi, karena inflasi dalam kadar wajar merupakan indikator bahwa perekonomian sedang bergerak.

Penelitian oleh Simanungkalit (2020) mendukung pandangan ini dengan menyebutkan bahwa sekitar 74,76% pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh tingkat inflasi, sedangkan sisanya berasal dari faktor lain. inflasi yang tidak dikelola dengan baik dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, sehingga dibutuhkan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Di antaranya adalah dengan menstabilkan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan kapasitas produksi sebagai langkah untuk menjaga kestabilan ekonomi.

B. Peran Inflasi yang Stabil dan Moderat

Inflasi yang berada pada tingkat rendah dan stabil cenderung mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, para pelaku usaha merasa lebih percaya diri karena tingkat ketidakpastian ekonomi berkurang, sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara optimal. Sebaliknya, inflasi yang fluktuatif atau terlalu tinggi justru menimbulkan gangguan dalam aktivitas ekonomi dan berpotensi menurunkan performa perekonomian secara menyeluruh.

Meskipun inflasi dapat merangsang peningkatan investasi dan produktivitas, inflasi yang tidak terkontrol justru menimbulkan dampak negatif. Hal ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara inflasi dan tingkat pengangguran, karena tingginya angka pengangguran menjadi kendala besar bagi stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan inflasi perlu diiringi dengan upaya untuk menekan angka pengangguran, agar potensi positif inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dimaksimalkan.

C. Dampak Inflasi terhadap Masyarakat dan Ketimpangan Ekonomi Pandemi COVID-19 memperburuk dampak inflasi terhadap perekonomian Indonesia. Tahun 2020 menjadi bukti nyata bahwa lonjakan harga kebutuhan pokok dan penurunan daya beli masyarakat selama masa pandemi memicu peningkatan tingkat pengangguran. Kondisi ini memperlambat laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan, khususnya dalam periode 2016 hingga 2020. Temuan ini mengindikasikan bahwa inflasi yang tinggi dalam masa krisis dapat memperburuk ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Sementara itu, Bagaimana inflasi memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Mereka mengidentifikasi sejumlah penyebab inflasi, antara lain peningkatan biaya produksi, lonjakan permintaan, dan distribusi barang yang tidak merata. Meskipun produsen bisa memperoleh keuntungan melalui kenaikan harga jual, masyarakat berpenghasilan tetap justru mengalami penurunan daya beli. Ketimpangan ini memperbesar jurang distribusi pendapatan dan memperparah kesenjangan ekonomi.

D. Kebijakan dan Implikasi terhadap Stabilitas Ekonomi

Berbagai studi di atas menggarisbawahi pentingnya pengendalian inflasi sebagai upaya utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflasi yang stabil dan rendah, strategi pengendalian inflasi harus mencakup langkah-langkah konkret seperti menstabilkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan produksi domestik, serta memperluas lapangan pekerjaan.

Pengalaman selama masa pandemi menunjukkan bahwa inflasi yang tidak dikendalikan dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi inflasi. Pendekatan yang komprehensif akan lebih efektif dalam mengurangi dampak buruk inflasi dan memaksimalkan manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dampak Inflasi terhadap Perilaku Konsumen

Inflasi membawa pengaruh besar terhadap perilaku konsumen, mendorong mereka untuk menyesuaikan cara berbelanja, membuat keputusan pembelian yang lebih selektif, dan mengubah preferensi konsumsi. Dalam kondisi ini, konsumen berusaha menjaga daya beli dan mengelola keuangan secara lebih hati-hati.

- **Penyesuaian Pola Belanja**

Konsumen menjadi lebih cermat dalam memilih produk dan cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok. Mereka juga mencari alternatif yang lebih hemat guna mempertahankan stabilitas keuangan (Wijaya, 2021).

- **Perubahan Prioritas Pembelian**

Kebutuhan dasar menjadi prioritas utama, sementara pembelian barang mewah atau non-esensial cenderung ditunda. Alokasi dana dilakukan dengan lebih selektif sebagai respons terhadap kenaikan harga (Siskawati, 2019).

- **Perubahan Preferensi Produk dan Merek**

Kenaikan harga mendorong konsumen untuk beralih ke produk atau merek yang lebih ekonomis. Produk lokal atau generik yang lebih terjangkau menjadi pilihan yang lebih menarik (Gampito & Melia, 2022).

- **Perubahan Kebiasaan Konsumsi**

Konsumen mulai berhemat, menunda pembelian besar, dan mengurangi aktivitas konsumtif seperti makan di luar. Ini mencerminkan upaya mengontrol pengeluaran di tengah ketidakpastian ekonomi (Ningsih, 2021).

- **Meningkatnya Kewaspadaan Finansial**

Konsumen lebih teliti dalam merencanakan anggaran dan mempertimbangkan investasi yang dapat melindungi nilai uang. Hal ini menunjukkan sikap proaktif menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil (Hadistia & Nurlinda, 2021).

- **Pemanfaatan Teknologi Keuangan**

Adopsi aplikasi keuangan digital meningkat karena dianggap membantu pengelolaan keuangan secara efisien. Perubahan ini memengaruhi cara konsumen bertransaksi dan menyimpan uang (Fabiola & Iradianty, 2021).

Secara keseluruhan, perilaku konsumen di masa inflasi mencerminkan strategi adaptasi terhadap tekanan ekonomi. Pemahaman terhadap perubahan ini penting bagi pelaku usaha dan pemerintah untuk merancang kebijakan dan strategi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Pemerintah Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan inflasi yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok meningkat, sehingga berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dilakukan melalui Bank Indonesia dengan mengatur suku bunga, menjaga kestabilan nilai tukar, dan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Di sisi lain, kebijakan fiskal dijalankan melalui pengaturan anggaran negara, termasuk pemberian subsidi, pengendalian harga barang-barang strategis, serta program bantuan sosial kepada masyarakat rentan. Kebijakan-kebijakan ini dirancang agar inflasi tetap dalam batas yang wajar sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Namun, penerapan kebijakan tersebut menghadapi tantangan yang cukup besar. Salah satunya adalah ketepatan sasaran dalam distribusi bantuan dan subsidi agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Selain itu, kestabilan harga juga bergantung pada faktor eksternal seperti kondisi global, harga komoditas internasional, dan perubahan iklim yang memengaruhi produksi pangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan akurasi data, serta mengembangkan strategi jangka panjang yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi gejolak ekonomi. Penguatan sektor riil dan peningkatan produktivitas dalam negeri juga menjadi kunci untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang mampu menahan dampak inflasi, sekaligus menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik pada Semester Genap Tahun Pembelajaran 2024/2025 yang telah memberi dukungan terhadap penyusunan artikel ini, serta kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dari awal sampai dengan akhir penyusunan artikel sesuai dengan rencana. Juga tidak lupa kami ucapkan kepada bapak dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik Bapak Dr. Dian Herdiana, S.IP. M.Ap yang telah membimbing kami dalam penyusunan artikel jurnal ini dengan dedikasi terbaik hingga kami dapat menuntaskannya. Serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dari awal hingga akhir penyusunan artikel sesuai dengan rencana dan bermanfaat menambah wawasan literatur.

REFERENSI

- Anas Wahid Maulana & Isnan Sayid Maulana. (2024). Dinamika Inflasi Di Indonesia Terhadap Daya Beli Masyarakat Pada Tinjauan Ekonomi Makro. *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(2), 20–29. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.437>
- Anggita Mujayanah, Desty Anggraini, Pinkan Dwi Ananda, & Rasidah Novita Sari. (2024). Dampak Inflasi terhadap Kesenjangan Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 339–346. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1444>
- Artati, L., Syuhada, N., Avika, N., & Hendra K, J. (2025). Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1), 306–315. <https://doi.org/10.57235/bima.v2i1.4905>
- Bank Indonesia. (2023). Kebijakan Moneter dan Stabilitas Harga. Diakses dari: <https://www.bi.go.id>
- Esosudarmo, BP, & Yamazaki, K. (2009). Faktor-faktor Penentu Inflasi di Indonesia. *Ekonomi Terapan*, 41 (17), 2177-2194.
- Halim, A. (2020). “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). APBN Kita – Kebijakan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi. Diakses dari: <https://www.kemenkeu.go.id>
- Yudiantoro, D. (2022). “Pengaruh Jumlah Uang Beredar Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2018-2021”. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 165-170
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Bank Indonesia. (2024). Laporan Perekonomian Indonesia 2023. Jakarta: Bank Indonesia.
- Agung, J., & Trisnanto, B. (2014). Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia: Apa yang Berubah Pasca Krisis Keuangan Global? *Buletin Studi Ekonomi Indonesia*, 50 (2), 219-236.
- Anggoro, DD, & Arin, F. (2017). Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia: Analisis Empiris. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8 (1), 1-18.
- Afifyahya/publication/377487995_Efek_Inflasi_terhadap_Daya_Beli_Masyarakat_pada_Tinjauan_Ekonomi_Makro/links/65a94226f323f74ff1c8625b/Efek-Inflasi-terhadap-Daya-Beli-Masyarakat-pada-Tinjauan-Ekonomi-Makro.